

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Siapkan Draft Pengajuan Kelola 13 Sungai

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku siap mengelola 13 sungai di bawah pemerintah pusat yang melintasi wilayah ibu kota. Bahkan, Pemprov DKI masih menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mengelola 13 sungai itu. Dengan MoU itu, Pemprov DKI berharap bisa melakukan pengerukan setiap saat terhadap 13 sungai itu.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, untuk mengeruk ke-13 sungai itu, pihaknya harus membuat terlebih dahulu MoU dengan pemerintah pusat lantaran kewenangannya milik pemerintah pusat. "Kami lagi menyusun draftnya dulu, nanti kita ajukan ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang menentukan tugas kita di 13 sungai itu," ungkap Juaini saat dihubungkan kemarin.

Dia menjelaskan, dalam draft yang diajukan itu diantaranya berisikan izin melakukan pengerukan, pengelolaan pintu, dan pompa air. Termasuk dengan pemasangan *sheet pile* atau tanggul sungai. Dia berharap draft yang akan diajukan tersebut disetujui pemerintah pusat.

DKI, kata Juaini, cukup mampu untuk mengelola 13 sungai tersebut, baik dari sisi sumber daya manusianya ataupun alat serta biayanya. Namun, untuk tahun ini belum ada anggarannya lantaran belum diajukan. "Nah, kalau sudah disetujui, kita akan ajukan anggaran kegiatan pengelolaan 13 sungai itu," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, untuk mengatasi permasalahan

an banjir di Ibu Kota Jakarta, Pemprov DKI bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) terus berkoordinasi dan berkolaborasi. Pada Minggu lalu, Sekretaris Daerah Saefullah bersama Kepala BBWSCC Bambang Hidayah menggelar rapat penanganan banjir Jakarta di Pintu Air Manggarai. Salah satu hasil rapat, yaitu DKI Jakarta diperbolehkan masuk dan melakukan pengerukan di 13 sungai yang sebelumnya menjadi kewenangan BBWSCC.

Juaini juga mengatakan, Pemprov DKI juga akan memperlebar drainase. Sebab, salah satu penyebab banjir juga karena sistem drainase tidak mampu menampung debit air hujan. Berdasarkan catatannya, drainase yang ada hanya menampung curah hujan sekitar 100-150 ml per hari. "Kami akan perlebar drainase yang ada saat ini," ungkapnya.

Juaini menjelaskan, pelebaran drainase akan dilakukan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air di lima wilayah kota dengan anggaran masing-masing sekitar Rp30-40 miliar. Menurut dia, saat ini suku dinas tengah memetakan drainase yang akan dilebarkan. Pelebaran drainase nanti akan disesuaikan dengan kondisi *existing* jalan.

Untuk di wilayah jalan protokol, kemungkinan akan dilebarkan sekitar dua sampai tiga meter dan di jalan lingkungan sekitar satu sampai dua meter. "Kedalamannya juga disesuaikan dengan kapasitas. Kalau dalamnya sekarang satu meter, kita tambahkan menjadi dua meter," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas

Bina Marga untuk memindahkan utilitas dari drainase yang ada. Sebab, sempitnya drainase karena banyak utilitas bercampur dalam drainase. "Nanti Dinas Bina Marga yang akan mengoordinasikan pemilik utilitas agar segera memisahkan dari drainase," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Forum Group Discussion (FGD) penanganan banjir di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, sistem drainase di Jakarta tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi. Hal itu kemudian menjadi alasan di balik banjir yang terjadi di Jakarta beberapa kali dalam dua bulan terakhir. "Curah hujan yang luar biasa tidak seimbang dengan sistem drainase yang kita miliki," kata Anies.

Kawasan dimaksud Anies adalah Halim Perdana Kusuma yang terdampak banjir dengan ketinggian 30 cm awal Januari lalu. Anies menuturkan, kawasan bandara udara itu memiliki drainase baik disertai kawasan hijau yang luas dan bersih. Namun, kapasitas drainase tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi.

Anies menambahkan, sistem drainase di Jakarta hanya mampu menampung curah hujan 100-150 ml/hari. Jika curah hujan sebesar itu tidak teralirkan pada sistem drainase, bisa dipastikan sistem drainase akan mampat. "Itu sama seperti kita pegang gelas, gelasnya kapasitasnya 250 ml dituang 100 ml itu tumpah, berarti yang pegang salah. Dituang 100 ml kok tumpah? Tapi, kalau dituang 500 ml dan tumpah, ya memang kapasitasnya tidak sanggup," katanya.

bimasetyadi